

**SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP PKI
Periode Yunus Anis dan Ahmad Badawi
(1960-1966)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Untuk
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Humaniora (S. Hum)

Oleh :

Muhammad Munawar Kholil

NIM : 02121012

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Munawar Kholil
NIM : 02121012
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 September 2009

Saya yang menyatakan.



Muhammad Munawar Kholil
NIM: 02121012

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP PKI (1960-1966)

yang ditulis oleh:

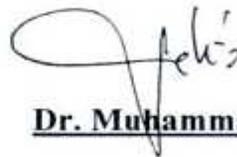
Nama : Muhammad Munawar Kholil
NIM : 02121012
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Wildan, MA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/1683/2009

Skripsi dengan judul : SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP PKI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUNAWAR KHOLIL

NIM : 02121012

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : B +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang,

Dr.H. Muh. Wildan, M.A
NIP.19710403 199603 1 001

Penguji I,

Drs. Musa, M.Si
NIP. 19620912 199203 1 001

Penguji II,

Dr. Maharsi, M.Hum
NIP. 19711031 200003 1 001

Yogyakarta, 18 Nopember 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab

DEKAN



Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.
NIP. 19520921 198403 1 001

MOTTO

*“Makin Tinggi Kebudayaan,
Makin banyak Konflik Yang Menghadang”*

“Telah Bertasbih Kepada Allah apa saja yang ada dilangit
dan apa saja
Yang ada di bumi dan Dia-lah yang maha Perkasa dan maha
Bijaksana”

PERSEMBAHAN

**Almamaterku Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga
Kepada Bapak Ibu yang senantiasa berdoa di rumah
Bapak Drs. H. Sukiran dan ibu Hj. subiyatun
Serta
Yang tercinta *sang bianglala***

ABSTRAKSI
SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP PKI
Periode Yunus Anis dan Ahmad Badawi (1960 – 1966)

Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi non pemerintah (Non Governmental Organisation- NGO) terbesar di Indonesia, yang mempunyai amal usaha yang terbanyak di Indonesia. Dalam perjalanannya Muhammadiyah telah melewati berbagai perubahan zaman di Nusantara. Dari era revolusi fisik, perang kemerdekaan dan era mengisi kemerdekaan.

Setelah merdeka, fokus perjuangan Muhammadiyah mengalami perubahan, dari perlawanan penjajahan menuju perlawanan kebodohan bangsa sendiri. Tuntutan ini disebabkan karena keadaan sosial politik di Negeri ini masih tidak stabil. Beberapa pemberontakan mengiringi perjalanan Republik yang masih muda, antara lain PRRI, RMS, DI/TII, PKI 1948, selain itu dipucuk pimpinan Negara, sudah terpecah belah menjadi kelompok-kelompok tertentu, terutama yang berkaitan dengan ideologi yang akan digunakan sebagai identitas Nasionalisme, yaitu antara Islam dan Nasionalis. Muhammadiyah terlibat langsung didalamnya dengan Ki Bagus Hadikusumo sebagai wakil dari umat Islam dalam merumuskan Pancasila. Dia harus rela ketika ketuju kata dalam sila pertama harus dihapus yang kemudian menjadi seperti yang sekarang ini.

Perjalanan Muhammadiyah dalam Pemilihan Umum 1955 dialokasikan ke partai Masyumi, Muhammadiyah menjadi salah satu anggota istimewa Masyumi, Masyumi satu-satunya Partai umat Islam sesuai dengan ikrar abadi umat Islam tahun 1947 di Seni Sono. Pemilu tahun 1955 dimenangkan oleh Masyumi, kemudian secara berurutan dimenangkan oleh PNI, NU, dan PKI. Secara otomatis peta kekuatan politik di Indonesia saat itu dikuasai oleh tiga kekuatan besar, yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis, hal inilah yang menjadi alasan bagi presiden Soekarno untuk membuat ideologi NASAKOM tahun 1960 demi keseimbangan politiknya. Presiden Soekarno setelah menerapkan ideologi NASAKOM menjadi sangat dekat dengan Komunis, bahkan dalam mengambil keputusan cenderung menguntungkan PKI, hingga akhirnya pemerintah membubarkan Masyumi yang dianggap kontra revolusioner pada tahun 1960.

Setelah kejadian itu, Muhammadiyah dalam berjuang lebih menekankan kepada amal usaha untuk membantu masyarakat. Disisi lain, PKI berhasil melakukan konsolidasi hingga menjadi sebuah partai yang besar dari segi ideologi, Muhammadiyah sebenarnya bertentangan dengan Komunisme, namun mengapa dalam menghadapi persoalan tersebut Muhammadiyah cenderung diam. Dan bagaimana bentuk gekan yang dilakukan untuk membendung Ideologi Komunis di Indonesia. Dari pertanyaan itu jawabannya akan dibatasi oleh waktu dan tempat. Tahun 1960 karena sejak diberlakukannya ideologi NASAKOM pada waktu itu, konsolidasi PKI sangat massif. Tahun 1966 karena waktu itu PKI secara institusi dan manifestasi dari Komunisme resmi dibubarkan. Muhammadiyah sendiri pada kurun waktu tersebut terjadi perang dingin dan perang ideologi, namun tidak tampak karena belum dilakukannya penelitian.

Dalam menjawab pertanyaan itu akan dipakai teori "tantangan dan jawaban" Arnold J Tonybee. Dibubarkannya Masyumi menjadi tantangan bagi Muhamadiyah untuk berjuang sendiri. Jawaban yang diberikan adalah ketika PKI ingin membubarkan HMI, Muhammadiyah membela sekuat tenaga.

Penulisan ini adalah penelitian sejarah, metode yang digunakan juga metode penulisan sejarah. Dengan urutan dalam metode sejarah yaitu: *heuristik, kritik sumber, interpretasi*, dan terakhir *historiografi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang dengan kasih-Nya tidak pernah berhenti melimpahkan berjuta rahmat, hidayah dan inayah-Nya baik bersifat lahir dan batin, sehingga karya ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengajari kita semua membuat perubahan kearah yang lebih baik.

Dalam kajian skripsi ini penulis melakukan spesifikasi dan spesialisasi konflik Muhammadiyah dan PKI. Skripsi ini penulis beri judul Sikap Muhammadiyah Terhadap Partai Komunis Indonesia (1960-1966)

Selanjutnya yang dapat penulis sampaikan adalah rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Muhammad Wildan selaku Pembimbing yang dengan tekun membaca kata demi kata hingga skripsi ini tersusun rapi seperti sekarang.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Semua Dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah mengajar penulis memahami sejarah.
6. Redaksi Suara Muhammadiyah, Perpustakaan PP Muhammadiyah, UIN Sunan Kalijaga, dan seluruh perpustakaan di Yogyakarta.
7. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas: Ajib, Nunuk, Wihda, Zeha, Pinawan, Lia, Asnain, Kupid, Husein dan lainnya.

Sebagai rasa terimakasih, penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini bermanfaat bagi khazanah pengetahuan sejarah dan memberikan sumbangan akademik kepada ilmu pengetahuan.

Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat.

Yogyakarta, 9 Agustus 2009

Muhammad Munawar Kholil
02121012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Landasan Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : SITUASI POLITIK INDONESIA PASCA PEMILU 1955	21
A. Muhammadiyah di pentas politik.....	26
B. Sejarah PKI	31
C. PKI Musuh Islam.....	42

BAB III : PANDANGAN DAN SIKAP MUHAMMADIYAH TERHADAP

PKI

A. Hubungan PKI dan Muhammadiyah.....	49
B. Pandangan Muhammadiyah terhadap PKI.....	51
C. Sikap Muhammadiyah terhadap PKI	62

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Maklumat Pemerintah No.X/1945¹ mengizinkan berdirinya partai-partai politik. Partai politik yang berdiri setelah dikeluarkannya maklumat tersebut adalah Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pada tanggal 7 Nopember 1945 yang secara ideologis merupakan kelanjutan dari MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang terbentuk tahun 1937. PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri 7 Nopember 1945 yang sebelumnya telah berdiri tanggal 21 Oktober 1945, PRJ (Partai Rakyat Jelata) pada 8 Nopember 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada 10 Nopember 1945, PSI (Partai Sarikat Islam) berdiri tanggal 20 Nopember 1945, PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) berdiri tanggal 8 Nopember 1945, disusul kemudian dengan berdirinya PNI (Partai Nasional Indonesia) tanggal 29 Januari 1946 dan PS (Partai Sosialis) yang berhaluan Marxis pada tanggal 17 Desember 1947.²

Seiring berdirinya partai-partai tersebut, pertentangan ideologi antara kelompok nasionalis agama dan nasionalis sekuler hingga komunis mulai terlihat. Muhammadiyah mempunyai peran besar dalam pendirian Masyumi. Pengurus Besar Masyumi dengan persentase rata-rata 55 persen berasal dari orang Muhammadiyah. Dalam jabatan pemerintahan, dari Kabinet 1 (Kabinet

¹ Farid Fathoni, *Kelahiran, yang Dipersoalkan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm.71

² *Ibid.* Lebih lengkap lihat dalam Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm 7

Presidensial) hingga Kabinet 4 (Kabinet Syahrir III), rata-rata 4 persen menteri dari Masyumi, 1,25 persennya dari unsur Muhammadiyah; Sejak Kabinet 5 (Kabinet Amir Syarifuddin I, setelah PSII dan Perti keluar dari Masyumi) hingga Kabinet 15 (Kabinet Wilopo) dari rata-rata 4,27 persen menteri yang mewakili partai Islam, 1,27 persennya berasal dari Muhammadiyah; dan sejak Kabinet 16 (Kabinet Ali Sastroamidjojo I, setelah NU keluar dari Masyumi) hingga Kabinet 18 (Kabinet Ali Sastroamidjojo II), dari rata-rata 9 persen menteri dari partai Islam, 1 persennya berasal dari Muhammadiyah.³

Dengan demikian, Masyumi sebagai kelanjutan kemampuan pengorganisasian diri kaum Muslimin (Muhammadiyah) secara politik, setelah kemerdekaan. Sebagai saluran politik tunggal bagi seluruh faksi-faksi dan aneka golongan Islam, Masyumi “sempat” berkembang menjadi salah satu pilar kekuasaan nasional yang disegani pasca kemerdekaan. Walau menggambarkan kegamangan posisinya secara kultural, Anderson menyebut Natsir, pemimpin puncak Masyumi kala itu, sebagai “*the most prestigious Moslem politician of the postindependence period.*”⁴

Hal yang terpenting di sini adalah kehadiran Muhammadiyah sebagai anggota utama.⁵ Apa yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa organisasi tersebut, sampai pada taraf tertentu, tidak melibatkan diri ke dalam dunia politik

³ Abdurrahim Ghazali, “Khitah Politik Muhammadiyah digugat”, *Kompas*, 6 Maret 2004

⁴ Benedict R’OG Anderson, *Language and Power. Exploring Political Culture in Indonesia* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1990), hlm. 72.

⁵ Alfian, *Muhammadiyah. The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989). Hlm. 17

secara langsung dan mempengaruhi berbagai kebijakan yang anti PKI.⁶ Meskipun demikian, melalui gerakan dan pengaruh sosial-keagamaan yang meluas, Muhammadiyah telah mengambil peran yang jauh lebih besar daripada sosok fisik masing-masing organisasi tersebut. Muhammadiyah, di satu pihak, yang lahir dan menjalankan pengaruhnya di wilayah perkotaan, telah berperan sebagai penyebar gagasan negara modern Indonesia di kalangan kaum terdidik, antara lain, melalui pembiasaan membuat laporan-laporan dan publikasi organisasi dalam bahasa Indonesia di masa kolonial.⁷

Kenyataan di atas mendorong Presiden Soekarno mengemukakan gagasan Negara Islam dalam pidatonya di Amuntai pada 1952, sebagai upaya mengerem laju perkembangan pengaruh partai politik ini.⁸ Seperti halnya dengan SI (Sarekat Islam) yang telah memiliki konstituen dari kalangan borjuis, Masyumi mendapatkan dukungan luas dari kalangan kota, kaum pedagang dan lapisan terdidik Islam. Di atas segala-galanya, Masyumi lebih terlihat sebagai — meminjam istilah Duverger— *a party of indirect structure*, dalam arti memiliki keanggotaan yang bersifat korporasi (*corporate members*), di samping keanggotaan individual. Ini berarti konstituen Masyumi telah memiliki kualitas

⁶ Setelah Masyumi dibubarkan pada awal 1960-an, Muhammadiyah secara resmi “mengundurkan diri” dari dunia politik. Kendati pun pada 1952 NU memisahkan diri dari Masyumi untuk menjadi partai politik tersendiri, namun sejak 1973, NU kembali menjadi organisasi nonpolitik hingga dewasa ini.

⁷ Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), hlm. 32

⁸ Boyd R. Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal. Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton* (Jakarta: LP3ES, 1992). Terutama lihat “Presiden Sukarno dan Negara Islam”, hlm. 121-133.

tertentu dalam kemampuan pengorganisasian diri. Sebab dengan memiliki *corporate members*, telah menyebabkan Masyumi, pada masa itu, menjadi satu-satunya partai politik yang didukung oleh berbagai kalangan⁹ —seperti NU, PERTI, HMI, PII dan Muhammadiyah merupakan anggota yang terpenting.¹⁰

Dalam parlemen itulah, Muhammadiyah melalui Masyumi selalu berlawanan arah dengan pendapat yang dilontarkan oleh PNI, terutama terkait dengan perizinan PKI untuk masuk parlemen. Di era presidensial, PKI sama sekali tidak punya peluang untuk masuk dalam parlemen. Orang-orang Muhammadiyah di Masyumi berpendapat dengan masuknya PKI, artinya sebuah pengakuan terhadap keberadaan partai komunis tersebut.

Setelah Pemilu 1955 PKI semakin gencar menyebarkan ideologinya. Penyebabnya, di samping perpecahan dalam tubuh umat Islam, juga karena mundurnya menteri-menteri yang berasal dari Masyumi. Menurut Deliar Noer, Masyumi-lah dengan Muhammadiyah sebagai anggotanya menjadi satu-satunya partai yang kritis terhadap Demokrasi Terpimpin. Sementara itu, pemerintahan dan kebijakan yang dikeluarkan cenderung menguntungkan PKI.¹¹

⁹ Ahmad Norma Permata “Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006”, *Disertasi*, (Jerman: Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, 2008), hlm. 57. Ia menyebutkan anggota Masyumi adalah

PSII (*Partai Sarekat Islam Indonesia*, Indonesian Islamic Union Party), PII (*Partai Islam Indonesia*, Indonesian Islamic Party), Muhammadiyah, NU (*Nahdhatul Ulama*, Revival of the Ulama) PERSIS (*Persatuan Islam*, Islamic Union), PUI (*Partai Umat Islam*, Muslim Party), PUII (*Partai Umat Islam Indonesia*, Indonesian Muslims Party), Jamiatul Wasliyah

¹⁰ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 374.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 374.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai era berlakunya kembali UUD'45 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan berbagai macam peristiwa politik yang tidak sehat. Manuver dan intrik yang dilakukan oleh PKI sangat membahayakan bagi kondisi politik yang sehat di negeri ini. Dalam situasi seperti itulah Yunus Anis terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959-1962 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta.

Pembubaran Masyumi bulan September 1960 membawa implikasi yang buruk terhadap umat Islam, karena umat Islam nyaris tidak terwakili di parlemen (DPRGR). Yunus Anis yang baru satu tahun menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah diminta oleh AH. Nasution menjadi anggota DPRGR yang sedang disusun oleh Presiden Soekarno sendiri. Kesediaannya menjadi anggota DPRGR sebenarnya mengundang banyak kritikan dari para tokoh Muhammadiyah saat itu, karena Muhammadiyah saat itu tidak mendukung kebijakan Presiden Soekarno yang membubarkan Masyumi dan bertindak secara otoriter menyusun parlemen.¹²

Periode kepemimpinan Yunus Anis melahirkan Rumusan Kepribadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut digarap oleh sebuah tim yang diketuai oleh KH. Faqih Usman, dan diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah. Pasca kepemimpinan Yunus Anis, perlawanan terhadap PKI dilanjutkan oleh Ahmad Badawi, selaku ketua umum PP Muhammadiyah tahun 1962-1968.

¹² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 561

Sementara itu, dalam khutbah *iftitah* Muktamar Muhammadiyah ke-36 pada tahun 1962, ketua PP Muhammadiyah KH Ahmad Badawi menyatakan bahwa ada oknum-oknum yang mempersulit Muhammadiyah. Dia mengatakan sebagaimana dikutip oleh *Suara Muhammadiyah*:

”Akhir-akhir ini nampak jelas ada yang sengaja mengaburkan masyarakat terhadap Muhammadiyah dan dihubungkan dengan pembubaran partai Islam Masyumi. Padahal kalau orang tidak hendak melupakan jasa Muhammadiyah dan usaha-usaha Muhammadiyah dalam ikut serta membina jiwa kemerdekaan nasional yang telah 50 tahun ini, tentulah mereka tahu bahwa Muhammadiyah sejak tahun 1912 sudah berdiri, sedang Masyumi baru didirikan pada tahun 1945”.¹³

Pidato di atas mengindikasikan adanya bahaya yang disebabkan PKI terhadap Muhammadiyah. Setelah bubarnya Masyumi, yang dianggap tidak menyalahkan pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), maka target PKI selanjutnya adalah membubarkan organisasi yang mempunyai hubungan dekat dengan Masyumi, diantaranya adalah Muhammadiyah dan HMI.¹⁴

Pandangan PKI tersebut masuk akal, karena orang-orang Muhammadiyah yang berbakat politik banyak yang berkecimpung dalam berbagai partai politik. Mereka ada yang di IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Masyumi, PNI bahkan PKI (seperti Haji

¹³ Ahmad Badawi, “Apa dan Siapa Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, No 17 Tahun 1963, hlm. 18.

¹⁴ Banyak tokoh HMI yang menjadi pengurus Masyumi, Deliar Noer menyebutnya dengan keluarga Bulan Bintang, mirip logo bendera Masyumi. Ajib Purnawan, *IMM Bersaksi di Tengah Badai* (Yogyakarta: Penerbit Panji 2007)

Misbach dan Tan Malaka, meskipun bukan masa ini). Setelah Masyumi bubar, sebagian besar mantan aktivis politik Muhammadiyah lalu mencurahkan kegiatannya kepada Muhammadiyah saja. Hal ini dianggap berbahaya oleh PKI karena Muhammadiyah dapat dijadikan sebagai alat perjuangan alternatif dalam melawan PKI. Sedangkan anggota-anggota Muhammadiyah lain yang partainya tidak bubar, mereka masih tetap konsentrasi kepada partainya dengan tanpa melupakan Muhammadiyah. Muhammadiyah melakukan indoktrinasi kepribadian agar mereka yang sudah biasa diliputi fikiran kepartaian dapat kembali menyemaikan fikiran-fikirannya "secara" Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bertugas dakwah Islamiyah. Hal ini perlu bagi mereka agar Muhammadiyah dapat jalan sebagaimana mestinya. Karena cara bekerja dalam partai politik jauh berbeda dengan Muhammadiyah.¹⁵

Menghadapi situasi kritis tersebut, Muhammadiyah yang pada waktu itu dipimpin oleh Ahmad Badawi menggunakan strategi lampu hijau. PKI menuduh Muhammadiyah sebagai sarang Masyumi. Sebaliknya, Muhammadiyah menunggu kesempatan mendekati Soekarno agar dapat dekat dengan Muhammadiyah sehingga bersedia memberi lampu hijau bagi persyarikatan. Dalam dokumen terbatas yang dikeluarkan oleh persyarikatan, digambarkan bagaimana Pimpinan Muhammadiyah berusaha menghadirkan Soekarno pada acara Penutupan Muktamar ke-35 di bulan Juli tahun 1962.¹⁶

¹⁵ Immawan Wahyudi "Pertarungan Yang Menegangkan", *Suara Muhammadiyah*, No 17/80/1995, hlm. 14

¹⁶ *Ibid.*

Dalam acara itu, panitia memasang baliho bergambar Soekarno yang bertuliskan *Sekali Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah*. Soekarno terkesan dengan tulisan itu. Dalam sambutannya Soekarno mengatakan: "Ya, *Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, dan Makin Lama Makin Cinta*". Pidato ini kemudian dibukukan kemudian disebar dengan judul "*Makin Lama Makin Cinta*". Masa-masa sulit akibat fitnah PKI ternyata telah menyebar luas ke masyarakat. Pimpinan Muhammadiyah melakukan indoktrinasi kepribadian Muhammadiyah merasa perlu hingga ke pelosok pelosok. Hasilnya menggembirakan. Presiden memberikan lampu hijau kepada Muhammadiyah, organisasi ini kembali menemukan *ghirahnya* dalam bergerak.¹⁷

Selain merongrong organisasi, PKI juga menyudutkan kiprah orang-orang Muhammadiyah dalam pemerintahan. Padahal mereka berjasa dalam mengembangkan Muhammadiyah melalui jalur politik. Apabila orang-orang itu kehilangan posisi dan jabatannya, niscaya Muhammadiyah sulit menjalankan misinya. Posisi-posisi strategis dalam struktur negara adalah salah satu *bargaining power* Muhammadiyah dalam peran sertanya membangun bangsa.¹⁸

Menghadapi situasi seperti dia atas, Muhammadiyah melalui *Suara Muhammadiyah* berusaha mendekati Presiden dengan selalu memuat nasehat-nasehat presiden Soekarno dalam setiap edisinya dari 1962 sampai 1966. Suatu cara Muhammadiyah agar kiprah orang-orangnya diakui sebagai pendukung segala apa yang dikehendaki Soekarno. *Suara Muhammadiyah* memberi judul

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ahmad Badawi "Apa dan Siapa Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, No 17 Tahun 1963, hlm. 18.

kolom ini dengan "Ajaran Paduka Yang Mulia/Pemimpin Besar Revolusi Presiden Soekarno".¹⁹

Jalan yang digunakan oleh Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam lainnya dalam menghadapi PKI hampir sama. Umat Islam benar-benar terusik oleh dominasi PKI dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Muhammadiyah tidak lupa menjalin kerjasama dengan organisasi Islam lain seperti NU (Nahdlatul Ulama). NU dengan GP (Gerakan Pemuda) Anshor-nya dan Muhammadiyah dengan PM (Pemuda Muhammadiyah)-nya menyatakan perlawanan terhadap PKI. Hal ini seperti diberitakan *Suara Muhammadiyah*:

"Pada sambutan di konferensi GP Anshor Sulawesi Selatan dinyatakan bahwa NASAKOM (Nasionalisme Agama dan Komunisme) adalah semata-mata siasat PKI belaka yang karena belum merasa kuat berpura-pura mau bekerjasama dengan golongan-golongan lain. Dalam masyarakat hanya ada dua jalan, yaitu jalan Allah dan jalan setan. Salah satu dari jalan setan itu ialah NASAKOM".²⁰

Suara Muhammadiyah adalah media yang berperan dalam propagandanya melawan komunis. Majalah ini di era dominasi PKI selalu menyuarakan aspirasi dari warga Muhammadiyah yang tidak setuju dengan dominasi komunis. Karena majalah ini terbit dua minggu sekali dan menyebar di setiap ranting

¹⁹ Rosjad Sholeh "Mengenang Kembali G 30 S/PKI", *Suara Muhammadiyah*, No. 18/66/1988, hlm. 14.

²⁰ Moh. Hatta, "Nasakom Djalan Setan", *Suara Muhammadiyah*, No. 3 Februari 1965, hlm. 7.

Muhammadiyah yang berada di pelosok, maka wahana ini sangat efektif untuk dijadikan sebagai ideologisasi bagi warga Muhammadiyah.

Cara yang dilakukan *Suara Muhammadiyah* adalah mengutip kata-kata orang yang berpengaruh dan punya kharisma di negeri ini untuk dipergunakan sebagai propaganda anti PKI. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta sering dimuat ulang tulisannya untuk kepentingan ini. Seperti "Nasakom-Jalan Setan", "Sosialisme Bukan Barang Baru", dan lain sebagainya.²¹ Selain tokoh-tokoh nasional, SM juga memuat tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri yang isinya adalah tidak setuju dengan PKI. Muhammad Dawam berkali-kali menulis tentang marxisme dan revisionisme, seorang Asvan Amin Putera menuliskan pembelaan yang harus dilakukan umat Islam atas hendak dibubarkannya HMI.²²

²¹ *Ibid*

²² Moh. Dawam, "Marxisme dan Revisionisme", *Suara Muhammadiyah*, 13-14 Tahun 46, Juli dan Agustus 1966, hlm. 9.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Perjuangan Muhammadiyah dalam kurun 1960 sampai 1966 M memiliki ciri khas tersendiri dengan era sebelumnya. Batasan awal, yaitu 13 September 1960, adalah masa dibubarkannya Masyumi sebagai kendaraan politik Muhammadiyah dalam parlemen. Sementara tahun 1966 sebagai batasan akhir dengan dibubarkannya PKI sebagai simbol dari komunisme di Indonesia.

Kurun waktu enam tahun perlawanan terhadap PKI dilakukan oleh dua orang ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kedua pemimpin ini mempunyai cara yang berbeda dalam konfrontasi organisasi dengan PKI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada waktu itu menjadi representasi dari setiap pandangan Muhammadiyah terhadap PKI pertanyaan yang kemudian timbul adalah

1. Apa definisi komunisme menurut Muhammadiyah?
2. Bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap komunisme?
3. Bagaimana perbedaan sikap terhadap PKI antara Yunus Anis dan Ahmad Badawi?
4. Bagaimana respon PKI terhadap Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan reaksi Muhammadiyah terhadap keberadaan PKI.
2. Mendeskripsikan perilaku politik dan tindakan warga Muhammadiyah terhadap PKI

Kegunaan penelitian ini antara lain untuk mengetahui aspek yang masih relevan kaitannya dengan perjuangan Muhammadiyah, sebagai upaya solutif-aplikatif terhadap problem-problem kontemporer.

Dalam usianya yang mencapai satu abad, tantangan Muhammadiyah semakin berat. Segala sikap yang diambil harus melalui pertimbangan secara matang dan penuh kehati-hatian. Dalam ranah politik misalnya, Muhammadiyah perlu membuat batasan-batasan yang jelas bagi kadernya yang ingin terlibat politik praktis. Agar nantinya tidak merugikan Muhammadiyah sebagaimana yang dialami oleh Muhammadiyah paska dibubarkannya Masyumi.

D. Tinjauan Pustaka

Referensi utama kajian ini adalah buku *IMM Bersaksi di Tengah Badai*, yang ditulis oleh Ajib Purnawan, diterbitkan oleh penerbit Panji di Yogyakarta (2007). Buku ini membahas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam peran sertanya melawan komunisme di Indonesia. Beberapa bagian buku tersebut membahas Muhammadiyah secara detail bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap PKI selaku pengusung ideologi komunis.

Referensi lainnya adalah buku berjudul *Pegangan Bagi Instruktur Kaderisasi Pemuda Muhammadiyah*, yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Jakarta pada tahun 1982. Di dalam buku tersebut dimuat buah pena Ahmad Badawi dalam sub-bab, dengan judul “Bid’ah dan Khurafat Yang Merusak Tauhid”. Pemaparan dalam sub-bab tersebut hanya terbatas pada kerangka teoritis saja dan khusus mengenai tauhid, walaupun

demikian buah pemikiran tersebut dapat memberikan sedikit gambaran mengenai landasan teologis dalam perjuangannya. Meskipun penerbitan buku tersebut sebagai salah satu upaya membendung komunisme, namun pembahasan dalam buku tersebut berbeda dengan penelitian ini, yaitu bahwa penelitian ini menggambarkan gerakan Muhammadiyah dalam menandingi paham komunis setelah Masyumi bubar.

Buku berjudul *Bintang Muhammadiyah* karya Djarnawi Hadikusumo, yang diterbitkan oleh penerbit Mega, Jakarta tahun 1965. Buku ini mengupas tentang penyematan Bintang Muhammadiyah oleh Ahmad Badawi selaku ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Presiden Soekarno. Bintang Muhammadiyah ini hanya diberikan kepada Soekarno selaku anggota setia Muhammadiyah atas pengabdian dan perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Hal ini merupakan salah satu strategi politis untuk mendekati Soekarno, agar Muhammadiyah mendapatkan “lampu hijau” untuk tetap eksis. Pada dasarnya, buku ini ingin menjelaskan kelihain seorang Ahmad Badawi agar Muhammadiyah tetap hidup meskipun Masyumi sudah dibubarkan.

Beberapa kajian di atas belum melakukan kajian khusus Muhammadiyah dalam melawan komunisme. Terutama yang berkaitan pasca Muhammadiyah lepas dari Masyumi. Penelitian ini merupakan upaya awal untuk menelusuri, mengkaji dan mencermati perjuangan Muhammadiyah setelah Masyumi dibubarkan. Kalau sebelumnya Muhammadiyah secara institusi melalui Masyumi melakukan perlawanan dalam parlemen, maka setelah Masyumi bubar bagaimana Muhammadiyah melawan komunisme.

E. Landasan Teori

Islam dan Komunisme merupakan, meminjam bahasa M. Amin Abdullah, *high tradition* pada masa itu. Sedangkan *low tradition*-nya adalah Muhammadiyah dan PKI. Kedua faksi ini tidak pernah satu pendapat dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kemaslahatan bangsa. Berbagai kepentingan melingkupi satu dan lainnya. Kepentingan untuk menghidupi kader-kadernya merupakan faktor utama yang menjadi penghalang kedua belah pihak untuk bersatu. Opini yang berputar di masyarakat menyatakan bahwa PKI anti Tuhan dan melakukan segala cara untuk melaksanakan niatnya. Sedangkan di basis PKI juga berputar opini bahwa umat kyai-kyai (pemimpin umat Islam) merupakan tuan-tuan tanah yang menyengsarakan buruh-buruh tani.

Tidak heran pasca Pemilu 1955 PKI masuk parlemen dan Masyumi memilih jadi oposisi. Tampak ada sebuah hubungan timbal balik antara strategi kelompok Islam Muhammadiyah, dengan kebijakan pemerintah yang selalu ditunggangi PKI. Dialektika kreatif dan historis ini kemudian mempengaruhi eskalasi konflik antara Muhammadiyah dan PKI. Benturan yang terjadi antara keduanya merupakan sebuah konflik horizontal sekaligus vertikal. Akar dari konflik adalah persoalan ideologis yang diperparah dengan berkembangnya sikap saling menekan.

Selanjutnya, kedua pelaku konflik terlibat dalam dinamika yang berbeda dan selalu berbenturan. Dalam keadaan demikian, PKI dalam bertindak selalu diusahakan untuk meniadakan keberadaan Muhammadiyah, begitu pula

sebaliknya. Konflik ini dapat berlangsung dalam taraf kognisi, emosi dan perilaku.²³ Cara mereka membuat aksi dan reaksi akan berakhir dengan kekerasan atau tanpa kekerasan, tergantung pilihannya.

Untuk menganalisis kajian ini, digunakan pendekatan “segi tiga konflik”. Konflik dipahami sebagai sebuah proses dinamis yang mencakup *isu*, *sikap* dan *perilaku* yang selalu berubah.²⁴ Ketiga proses dinamis itu menjadi irama atau pola yang dapat diamati sebagai proses sejarah.²⁵ Maka muncullah di sini tantangan dan tanggapan oleh Muhammadiyah dan PKI terhadap masing-masing segitiga konflik di atas. Teori tentang tantangan dan tanggapan (*challenge and response*) dicetuskan oleh sejarawan Arnold Toynbee.

Gerakan Muhammadiyah memiliki idealisme keislaman, dan dipengaruhi oleh isu mengenai bahaya komunisme/PKI. Apalagi pada waktu itu banyak berita yang selalu mendiskreditkan Muhammadiyah oleh PKI dan CGMI (Concentracy Gerakan Mahasiswa Indonesia). Isu tersebut berkembang menjadi sikap anti Muhammadiyah terhadap PKI. Rasa tidak percaya dan takut akan bahaya komunisme menyebabkan Muhammadiyah harus bertindak untuk melakukan sesuatu hal yang bertujuan menyelamatkan bangsa ini. Sikap tersebut melahirkan ide-ide agar dapat mengamankan umat Islam dari komunisme, mempertahankan

²³ Arifah Rahmawati, *Konflik Vertikal di Indonesia*, disampaikan dalam “Diseminasi Hasil Penelitian Unggulan Dan Workshop Resolusi Konflik di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga di Hotel Syahid Yogyakarta tanggal 13-15 September 2005, hlm 5

²⁴ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace And Conflict, Development And Civilization*(London: Sage, 1996), hlm. 27

²⁵ F.R. Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, terj. Dick Hartoko (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 17

eksistensi organisasi yang baru lahir, dan lain-lain yang mengantarkan Muhammadiyah pada sebuah perilaku tertentu. Perilaku itu mengarah kepada berbagai usaha pembubaran PKI.

Sederhananya, isu negatif PKI terhadap Muhammadiyah menjadi tantangan yang harus mendapatkan tanggapan, begitu pula sebaliknya. Hingga proses ini berlangsung dari sekedar ide ke ranah fisik.

Kesimpulan sementara, kriteria terciptanya suatu tanggapan yang memadai adalah keras atau lunaknya tantangan. Kriteria kedua, kehadiran elite kreatif yang akan memimpin dalam memberikan tanggapan atas tantangan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yunus Anis dan Ahmad Badawi dalam tubuh Muhammadiyah. Sebab seluruh tindakan sosial adalah karya individu-individu pencipta atau yang terbanyak karya minoritas kreatif itu.

Antara tantangan dan tanggapan berbentuk kurva linear. Artinya, tingkat kesukaran yang cukup besar dapat membangkitkan tanggapan memadai; tetapi tantangan ekstrem dalam arti terlalu lemah dan terlalu keras, tidak memungkinkan dapat membangkitkan tanggapan yang memadai. Jika tantangan terlalu keras, peradaban dapat hancur atau terhambat perkembangannya. Dalam kasus seperti itu, tantangan memiliki cukup kekuatan untuk mencegah perkembangan normal, meskipun tidak cukup keras sehingga menyebabkan kehancurannya, seperti nasib PKI setelah peristiwa Gerakan September Tiga puluh (Gestapu).

F. Metode Penelitian

Hal yang sangat urgen dalam upaya melakukan penelitian ilmiah yaitu metode, sebagai kerangka landasan dalam melakukan kegiatan ilmiah. Sesuai dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah, yaitu proses pengumpulan data kemudian menguji, menganalisis secara kritis dan menafsirkan suatu gejala peristiwa atau gagasan yang muncul pada masa lampau.²⁶

Sejarah adalah peristiwa masa lampau yang meliputi apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh orang.²⁷ Penelitian sejarah berupaya mengkaji dan menganalisa secara sistematis dan objektif terhadap persoalan masa lampau, dan bertujuan untuk mendeskripsikannya,²⁸ menjelaskan dan memberikan justifikasi terhadap masa kini dan masa depan, serta memprediksi dan bahkan menguasai atau mengontrol masa depan.²⁹

Tahap-tahap yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Dalam tahap pengumpulan sumber (data), peneliti melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber literatur dari beberapa buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu dalam hal ini tentang Pandangan Muhammadiyah terhadap komunisme. Dalam upaya

²⁶ Louis Gottshalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32

²⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bentang Budaya: Yogyakarta, 2001), hlm. 18

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 25

²⁹ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 106-107

pengumpulan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian tersebut, peneliti mencari di *Suara Muhammadiyah*, internet dan berbagai perpustakaan di Yogyakarta, diantaranya yaitu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Perpustakaan Collage Ignatius, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan lain sebagainya.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Dari berbagai sumber yang sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan verifikasi guna memperoleh data yang valid. Kritik ekstern untuk menguji dan meneliti keotentikan sumber yang telah diperoleh, sehingga validitas sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kritik intern untuk mengetahui kredibilitas sumber. Dalam penelitian ini dilakukan kritik intern, dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai sumber yang sudah didapatkan, baik dari segi waktu (masa penulisan), tempat penulisan, bahasa maupun ungkapan. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan antara isi sumber yang satu dengan yang lain guna menemukan keabsahan sumber dan mengambil data yang bisa dipercaya.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Setelah melakukan verifikasi, langkah selanjutnya adalah penafsiran/interpretasi terhadap sumber-sumber dan data yang sudah terkumpul. Interpretasi atau sering disebut analisis mempunyai pengertian menguraikan

dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan³⁰ Dalam kerangka metode ini, peneliti akan memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh mengenai pandangan Muhammadiyah yang menyebabkannya melawan komunisme dengan bantuan teori yang sudah peneliti paparkan di atas. Hal ini guna memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan langkah terakhir setelah pengumpulan dan penyaringan data hingga menjadi kesimpulan akhir yang relevan. Dalam hal ini, peneliti akan menuliskan dan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan secara jelas, sesuai dengan kerangka tulisan dan sistematika pembahasan dalam penyajian hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini memuat tiga bagian besar, Pendahuluan, Isi dan Penutup. BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bagian Isi dari penulisan ini memuat BAB II dan BAB III. BAB II menjelaskan konstelasi politik Indonesia setelah Pemilu tahun 1955, yang menjelaskan keberadaan Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi. Penjelasan dilanjutkan dengan kiprah politik Muhammadiyah setelah Masyumi

³⁰ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 64

bubar. BAB III menguraikan definisi Komunisme menurut Muhammadiyah dan persepsi masyarakat Muhammadiyah mengenai komunisme. Hal ini yang dijadikan acuan oleh penulis untuk menilai pandangan Muhammadiyah terhadap komunisme.

Terakhir adalah bagian penutup yang terdiri dari satu bab dan dua bagian. Bagian pertama yakni sedikit catatan dan pendapat Muhammadiyah dalam memandang dan menyikapi komunisme tahun 1960-1966 yang diakhiri kesimpulan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konfrontasi Muhammadiyah dengan PKI dan ormasnya dari segi gerakan berbeda antara sebelum dan sesudah G 30 S. Sebelum G 30 S pergerakan dilakukan dengan cara halus. Dua organ ini saling berebut pengaruh di tingkat pemerintahan. Dalam bergerak, Muhammadiyah lebih suka sendiri daripada bekerjasama dengan ormas lain. Gerakan Muhammadiyah sesudah G 30 S mengambil bentuk berbagai bentuk dengan memanfaatkan organisasi otonom yang dimilikinya.

Penulis berkesimpulan bahwa pola sikap Muhammadiyah dalam terhadap PKI ada tiga. *Pertama*, Sikap Individu yaitu sebuah sikap melalui gerakan konfrontatif yang dilakukan anggota Muhammadiyah tanpa mengatasnamakan organisasi. Gerakan ini seperti dilakukan oleh mereka yang menyetujui ide Muhammadiyah dalam melawan PKI namun tidak setuju terhadap gerakan organisasi. Mereka bergerak sebagai individu-individu atau membuat komunitas sendiri.

Kedua adalah Sikap Organisasional, adalah gerakan secara aktif dan intensif berupa wacana atau praksis yang dilakukan organisasi.

Ketiga adalah Sikap Jaringan, merupakan bentuk perlawanan terhadap PKI yang paling efektif. Muhammadiyah bergabung dengan organisasi lain yang mempunyai ide sama dengan Muhammadiyah atas ketidaksetujuannya terhadap

PKI. Sebelum G 30 S, Muhammadiyah berusaha masuk bergabung dan membuat jaringan sendiri.

B. Saran

Penulisan skripsi yang berjudul “ Sikap Muhammadiyah Terhadap PKI (1960-1965)” ini penulis sadari masih banyak kekurangan, baik dari segi pemilihan bahasa dan pemilihan sumber. Namun penulis dengan senang hati menerima kritik yang datang dari setiap orang demi sumbangan terhadap kepentingan akademik.

Dalam penggalian data, penulis masih merasa kurang maksimal dalam mengerjakannya disebabkan beberapa faktor. Terutama dalam masalah dana, hal ini penulis rasakan ketika beberapa informan mengatakan kepada penulis bahwa data yang lebih lengkap untuk saat ini hanya dapat dicari di PWM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara yang ada di Yogyakarta kebanyakan sudah hilang akibat sistem dokumentasi di Muhammadiyah kurang terorganisir. Penulis merasa lebih kesulitan lagi ketika sumber primer, yang dalam hal ini informan, yang tinggal di Yogyakarta sudah banyak yang meninggal dunia.

Penulis memberikan saran kepada Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam khususnya, agar benar-benar serius dalam menyediakan data yang lebih lengkap di perpustakaan fakultas. Semisal jurusan SKI membuat sendiri laboratorium Sejarah.

Terakhir penulis menyarankan kepada Suara Muhammadiyah agar memperbaiki sistem kearsipan dan peminjaman dokumen. Selama ini, Suara Muhammadiyah kurang memperhatikan dokumentasi dari terbitan yang terdahulu.

Sehingga arsipnya terkesan kocar kacir dan kurang lengkap. Maka dari itu, perlu dibentuk tim khusus dari organisasi otonom untuk menata dan mengumpulkan kembali arsip Suara Muhammadiyah dari masa awal terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT. Logos
Wacana Ilmu
- Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Anderson, Benedict R'OG. 1990. *Language and Power. Exploring Political Culture in Indonesia*. Ithaca dan London: Cornell University Press
- Ankersmit. F.R. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, terj. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia,
- Anwar, Rosihan. 2007. *Sukarno, Tentara dan PKI*. Jakarta: Yayasan Obor
- Azra, Azyumardi. 2002. *Historiografi Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramedia
- Badawi, Djaldan. 2001. *Buku Putih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
- Compton, Boyd R. 1992. *Kemelut Demokrasi Liberal. Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton*. Jakarta: LP3ES,
- Fathoni, Farid.1990. *Kelahiran,yang Dipersoalkan*. Surabaya: Bina Ilmu
- Galtung, Johan. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace And Conflict, Development And Civilization*. London: Sage
- Gottshcalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press
- Khutbah Iftitah Mu'tamar ke-35 di Jakarta*

Kompas, 6 Maret 2004

Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya: Yogyakarta,
Laporan Mu'tamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta pada tanggal 21-26
 September 1968

Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962-1965 dalam sidang
 Mu'tamar ke-37 di Yogyakarta , tidak diterbitkan

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara,

Mu'awan Djamal. 1991. Sikap dan Pandangan Hidup Muhammad Yunus
 Anis. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Adab/SKI IAIN Sunan Kalijaga,

Nakamura, Mitsuo. 1983. *The Crescent Arises over the Banyan Tree: Study of
 the Muhammadiyah Movement in a Central javanese Town*.
 Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Noer, Deliar. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Bandung: Mizan

Pasha, Musthafa Kemal dan Darban, Adaby. 2003. *Muhammadiyah Sebagai
 Gerakan Islam: dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta,
 LPPI

Permata, Ahmad Norma. 2008. "Islamist Party and Democratic Participation:
 Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006". *Disertasi*.
 Jerman: Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster,

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1963. *Laporan Sidang Tanwir 1963*.
 Yogyakarta: PP Muhammadiyah

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1963. *Pedoman Penjelasan tentang Kepribadian Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1989. *Kepribadian Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah,
- Purnawan, Ajib. 2007. *IMM Bersaksi di Tengah Badai*. Yogyakarta: Penerbit Panji
- Rahmawati, Arifah. 2005. *Konflik Vertikal di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga
- Ricklefs, M.C., 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi
- Salim, Hairus. 2004. *Kelompok Paramiliter NU*. Yogyakarta: LKIS
- Samsuri. 2004. *Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Safiria Insania Press
- Suara Muhammadiyah*, No 1 Tahun 57, Oktober 1977
- Suara Muhammadiyah*, 13-14 Tahun 46, Juli dan Agustus 1966
- Suara Muhammadiyah*, No 10 Tahun 38, Mei 1966
- Suara Muhammadiyah*, No 17 Tahun 1963
- Suara Muhammadiyah*, No 17/80/1995
- Suara Muhammadiyah*, No 3 Tahun 38, Februari 1966
- Suara Muhammadiyah*, No. 16 Th. 47, Agustus 1967
- Suara Muhammadiyah*, No. 18/66/1988
- Suara Muhammadiyah*, No. 3 Februari 1965
- Suara Muhammadiyah*, No.20, Desember 1966

Suara Muhammadiyah, No.3 -2-1965

Suara Muhammadiyah, No.4-5, Februari-Maret 1966

Sudibyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya

Suratmin. 1999. *H.M. Yunus Anis: Amal, Pengabdian dan Perjuangan*. Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah

KH Kolonel Yunus Anis

Muhammad Yunus Anis dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1903. Ayahnya, Haji Muhammad Anis, adalah seorang abdi dalem Kraton Yogyakarta. Berdasarkan surat kekancingan dari Swandana Tepas Dwara Putera Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1961, disebutkan bahwa Yunus Anis masih ada hubungan kekerabatan dengan Sultan Mataram. Sejak kecil ia dididik agama oleh kedua orang tuanya dan datuknya sendiri, terutama membaca al-Qur'an dan pendidikan akhlaq. Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di Sekolah Al-Atas dan Sekolah Al-Irsyad di Batavia (Jakarta) yang dibimbing oleh Syekh Ahmad Syurkati, seorang kawan akrab Kiai Dahlan. Pendidikan yang diterima di sekolah tersebut membawa dirinya tampil sebagai pemimpin Islam di Indonesia yang tangguh.

Setelah menamatkan pendidikannya, Yunus Anis mengaktifkan diri sebagai muballigh. Ia banyak terjun ke masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan misi dakwah dan Muhammadiyah. Ia juga banyak mendirikan cabang Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia.

Ia dikenal juga sebagai organisator dan administrator. Tahun 1924-1926 ia menjabat sebagai Pengurus Cabang Muhammadiyah di Batavia. Kepemimpinannya semakin menonjol dan memperoleh kepercayaan dari keluarga besar Muhammadiyah. Pada tahun 1934-1936 dan 1953-1958 ia dipercaya sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kepiawaiannya dalam pengetahuan agama menyebabkan banyak orang percaya kepadanya, termasuk tentara. TNI pada tahun 1954 mengangkatnya sebagai Kepala Pusroh Angkatan Darat Republik Indonesia (Imam Tentara). Berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai imam tentara, ia banyak memberikan pembinaan mental bagi tentara saat itu.

Pembubaran Masyumi membawa implikasi yang buruk terhadap ummat Islam, karena ummat Islam nyaris tidak terwakili di parlemen saat itu (DPRGR). Dalam kondisi seperti itu, ia diminta oleh beberapa orang, termasuk oleh AH. Nasution, untuk bersedia menjadi anggota DPRGR yang sedang disusun oleh Presiden Soekarno sendiri. Kesediaannya menjadi anggota DPRGR sebenarnya mengundang banyak kritikan dari para tokoh Muhammadiyah saat itu, karena Muhammadiyah saat itu tidak mendukung kebijakan Presiden Soekarno yang membubarkan Masyumi dan bertindak secara otoriter menyusun anggota parlemen. Namun kritik itu dijawab bahwa keterlibatannya dalam DPRGR bukanlah untuk kepentingan politik jangka pendek, tetapi untuk kepentingan jangka panjang, yaitu mewakili ummat Islam yang nyaris tidak terwakili dalam parlemen saat itu.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai era berlakunya kembali UUD'45 dalam negara kesatuan republik Indonesia menimbulkan berbagai macam peristiwa politik yang tidak sehat. Manuver dan intrik yang dilakukan oleh partai politik, terutama Partai Komunis Indonesia, sangat membahayakan bagi kondisi politik yang sehat di negeri ini. Dalam situasi seperti itulah Yunus Anis terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959-1962 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta.

Pada periode kepemimpinannya diusahakan melahirkan Rumusan Keperibadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut digarap oleh sebuah team yang diketuai oleh KH. Faqih Usman, dan akan diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah. (*muhammadiyah.or.id*)

KH Ahmad Badawi

Ahmad Badawi lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1902 sebagai putra ke-4. Ayahnya bernama KH. Muhammad Fakih (yang merupakan salah satu Pengurus Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai Komisaris), sedangkan ibunya bernama Nyai H. Sitti Habibah (yang merupakan adik kandung dari KH. Ahmad Dahlan). Jika dirunut silsilah dari garis ayah, maka Badawi memiliki garis keturunan dari Panembahan Senopati. Dalam keluarga Badawi sangat kental dengan ditanamkan nilai-nilai agama. Dan ini sangat mempengaruhi perilaku hidup dan etika kesehariannya. Di antara saudara-saudaranya, Badawi memiliki kelebihan, yaitu senang berorganisasi. Hobinya ini menjadi ciri khusus baginya yang tumbuh sedari masih remaja, yaitu ketika ia masih menempuh pendidikan. Sejak masih belajar mengaji di pondok-pondok pesantren, dia sering membuat kelompok belajar/ organisasi yang mendukung kelancaran proses mengajinya.

Usia dininya dilalui dengan belajar mengaji pada ayahnya sendiri. Pada tahun 1908-1913 menjadi santri di Pondok Pesantren Lerab Karanganyar. Di pesantren ini ia belajar banyak tentang nahwu dan sharaf.

Pada tahun 1913-1915 ia belajar kepada ustadz KH. Dimiyati di Pondok Pesantren Termas Pacitan. Di pesantren ini, ia dikenal sebagai santri yang pintar berbahasa Arab (Nahwu dan Sharaf) yang telah didapat di Pondok Lerab. Dan pada tahun 1915-1920 Ahmad Badawi mondok di Pesantren Besuk, di Wangkal Pasuruan. Akhirnya ia mengakhiri pencarian ilmu agama di Pesantren Kauman dan Pesantren Pandean di Semarang pada tahun 1920-1921. Sedangkan pendidikan formalnya hanya didapatkan di Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta, kemudian berubah menjadi *Standaarschool* dan kemudian menjadi Sekolah Dasar.

Tumbuhnya organisasi-organisasi kebangsaan ketika usia Badawi masih remaja membuatnya harus pandai-pandai untuk menentukan pilihan aktivitas organisasi. Masing-masing organisasi berupaya menggalang anggota-anggotanya dengan berbagai macam cara untuk bersatu mengusir pemerintah kolonial Belanda dengan berbagai variasi sesuai dengan misi dan visi organisasinya.

Keinginannya untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang telah dipelajarinya dari berbagai pesantren akhirnya mengantarkannya pada Muhammadiyah sebagai pilihannya dalam beraktivitas. Hal ini dilatarbelakangi oleh misi, visi, dan orientasi Muhammadiyah selaras dengan cita-cita Badawi. Keberadaannya di Muhammadiyah lebih diperjelas dengan tercatatnya ia di buku Anggota Muhammadiyah Nomor 8543 pada tanggal 25 September 1927. Keanggotaan ini diperbarui pada zaman Jepang sehingga ia ditempatkan pada nomor 2 tertanggal 15 Februari 1944 (Jusuf Anis, tt, p. 25).

Pada masa perjuangan, Badawi pernah memasuki Angkatan Perang Sabil (APS). Ia turut beroperasi di Sanden Bantul, Tegallayang, Bleberan, Kecabea Kulon Progo. Pada tahun 1947-1949, Badawi menjadi Imam III APS bersama dengan KH. Mahfudz sebagai Imam I dan KRH. Hadjid selaku Imam II untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia juga pernah menjadi anggota Laskar Rakyat Mataram atas instruksi dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan bergabung di Batlyon Pati dan Resimen Wiroto, MPP Gedongan. Pada tahun 1950, Badawi dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Masyumi di Yogyakarta. Di partai ini, ia tidak banyak perannya, karena partai ini kemudian membubarkan diri.

Semenjak ia berkiprah di Muhammadiyah, ia lebih leluasa mengembangkan potensi dirinya untuk bertabligh. Keinginan ini dijalankan melalui kegiatan sebagai guru di sekolah (madrasah) dan melalui kegiatan dakwah lewat pengajian dan pembekalan ke-Muhammadiyah-an. Prestasi di bidang tabligh telah mengantarkan Badawi untuk dipercaya menjadi Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Pada tahun-tahun berikutnya, ia juga disertai amanat untuk menjadi Kepala Madrasah Za'imat (yang kemudian digabung dengan Madrasah Muallimat pada tahun 1942). Di Madrasah Muallimat ia mempunyai obsesi untuk memberdayakan potensi wanita, sehingga mereka akan bisa menjadi mubalighat yang handal di daerahnya.

Semenjak itu, keberadaan Badawi tidak diragukan lagi. Di Pimpinan Pusat Muhammadiyah ia selalu terpilih dan ditetapkan menjadi wakil ketua. Kemudian pada waktu Mukhtamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, Badawi terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962-1965, dan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung terpilih lagi menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965 - 1968.

Citra politik Muhammadiyah pada periode kepemimpinan Badawi memang sedang tersudut, karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Masyumi yang saat itu sedang menjadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Citra ini memang sengaja dihembus-hembuskan oleh PKI, bahwa Muhammadiyah dituduh anti-Pancasila, anti-NASAKOM, dan pewaris DI/TII. Muhammadiyah saat berhadapan dengan adanya banyak tekanan politik masa Orde Lama.

Menghadapi realitas politik seperti itu, Muhammadiyah akhirnya dipaksa berhadapan dengan urusan-urusan politik praktis. Muhammadiyah sendiri kurang leluasa dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem politik yang dibangun Orde Lama. Akhirnya Muhammadiyah mengambil kebijakan politik untuk turut serta terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan. Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa Muhammadiyah hanya mampu mengerem laju pengaruh komunis di masa Orde Lama yang kurang mengedepankan nilai agama dan moralitas bangsa.

Kebijakan Muhammadiyah seperti itu akhirnya membawa kedekatan Badawi dengan Presiden Soekarno. Semenjak 1963, Badawi diangkat menjadi Penasehat Pribadi Presiden di bidang agama. Perlu diperhatikan bahwa kedekatan Badawi dengan Soekarno bukan untuk mencari muka Muhammadiyah di mata Presiden. KHA. Badawi sangat bijak dan pintar dalam meloby Presiden dengan nuansa agamis. KHA. Badawi tidak menjilat dan menjadi antek Soekarno seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain. Ia memiliki prinsip

agama yang kuat, sehingga Muhammadiyah mengamanatkan kepadanya untuk mendekati Soekarno. Kedekatan ini juga dirasakan oleh Soekarno, bahwa dirinya sangat memerlukan nasehat-nasehat agama. Oleh karenanya bila KHA. Badawi memberikan masukan-masukan yang disampaikan secara bijak, Soekarno sangat memerhatikannya. Bahkan Menteri-menterinyapun diminta turut memerhatikan fatwa Badawi.

Bagi Muhammadiyah, hal ini sangat menguntungkan. Fitnahan terhadap Muhammadiyah yang bernada negatif terus jalan, maka hal itu harus diimbangi dengan upaya mengikisnya. Soekarno sendiri sadar bahwa Muhammadiyah senafas dan seiraman dengan Masyumi, ia tetap membutuhkan kehadiran Muhammadiyah. Bahkan ia semakin menyukainya atau untuk ballance of power policy (PP. Muhammadiyah, tt, halaman 6). Iktikad baik Soekarno ini menunjukkan bahwa dirinya sangat memerlukan kehadiran Muhammadiyah untuk mengimbangi keberadaan PNI, NU, dan PKI yang dirasanya lebih dekat.

Nasehat-nasehat politik yang diberikan Badawi sangat berbobot dipandang dari kacamata Islam. Secara relatif ia bisa mengendalikan Presiden Soekarno agar tidak terseret terlalu jauh dari pengaruh-pengaruh komunis yang menggerogotinya. Siraman rohani disampaikannya kepada Soekarno tidak terikat oleh ruang dan waktu. Di mana ada kesempatan, Badawi memberikan nasehatnya kepada Presiden. Pada tahun 1968, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Pengangkatan ia berdasar pada prestasinya ketika memimpin Muhammadiyah (1962-1965 dan 1965-1968) dan pengalaman ia menjadi Penasehat Pribadi Presiden Soekarno di bidang agama. Di DPA, ia memberikan nasehat kepada Presiden Soeharto di bidang agama Islam. Di Dewan Pertimbangan Agung, KHA. Badawi sebenarnya sedikit memberikan nasehatnya pada awal Orde Baru. Hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang sudah melemah. Penyakit yang disandangnya kurang memungkinkan fisiknya yang sudah tua untuk turut berkiprah lebih banyak dalam memberikan sumbangsuhnya kepada negara dan bangsa.

Di samping sebagai pemimpin, Badawi juga produktif sebagai penulis. Karya-karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain ialah Pengadjian Rakjat, Kitab Nukilan Sju'abul-Imam (bahasa Jawa), Kitab Nikah (huruf Pegon dan berbahasa Jawa), Kitab Parail (huruf Latin berbahasa Jawa), Kitab Manasik Hadji (bahasa Jawa), Miah Hadits (bahasa Arab), Mudzakkirat fi Tasji'il Islam (bahasa Arab), Qawaidul-Chams (bahasa Arab), Menghadapi Orla (Bahasa Indonesia), dan Djadwal Waktu Shalat untuk selama2nja (HM. Jusuf Anis, tt: 27).

Badawi meninggal pada hari Jum'at 25 April 1969 pada pukul 09.45 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Upaya kedokteran tidak bisa menghadang takdir Allah yang telah ditentukan atasnya. Di saat meninggal, Badawi masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1968. Sedang di Muhammadiyah ia ditempatkan sebagai Penasehat PP. Muhammadiyah periode 1969-1971 berdasar hasil Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta. (*muhammadiyah.or.id*)



Ahmad Badawi. 1902 – 1969



Yunus Anis. 1903 - 1962

Peristiwa Penting
Kepemimpinan HM Yunus Anis dan KH Ahmad Badawi

1959	<ul style="list-style-type: none"> • 18-23 November Muktamar XXXIV Muhammadiyah di Yogyakarta memilih M. Junus Anis sebagai ketua Pimpinan Pusat periode 1959-1962. Muktamar ini menetapkan langkah ke depan tahun 1959-1962 “yang meliputi bidang kepemimpinan, dakwah, pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, wakaf, keputrian, kepemudaan, perekonomian, keagamaan, taman pustaka, dan bidang-bidang lain yang dipandang perlu”.
1960	<ul style="list-style-type: none"> • 24-28 Juli. Muktamar Pemuda Muhammadiyah II di Yogyakarta memutuskan terbentuknya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organ resmi pelajar Muhammadiyah
1961	<ul style="list-style-type: none"> • Atas jasa-jasa K.H. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menentukannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. 2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan ummat, dengan dasar iman dan Islam. 3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam. 4. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita (Aisyiyah) telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengesep pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. • Pembentukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (sampai menjelang muktamar tahun 2000 bernama Ikatan Remaja Muhammadiyah). • 25-27 November, Sidang Tanwir di Yogyakarta menerima rencana Garis Perjuangan Muhammadiyah yang idenya datang dari Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, yang ininya menghendaki agar Muhammadiyah saat itu memperluas bidang perjuangannya, tidak hanya menitikberatkan dalam bidang sosial, tetapi juga meliputi bidang-bidang lain yang memang menjadi alat untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam.
1962	<ul style="list-style-type: none"> • 21-25 Muktamar XXXV Muhammadiyah di Jakarta. Terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat adalah Ahmad Badawi. Pada resepsi penutupan turut memberi sambutan adalah Presiden Sukarno sendiri dengan sambutan berjudul “Makin Lama Makin Cinta” dan Dr. Roeslan Abdoelgani dengan sambutan berjudul “Palu Godam terhadap Kolonialisme dan Imperialisme, Muhammadiyah sebagai Gelombang Pemukul Kembali terhadap Kolonialisme dan Imperialisme”. • Muktamar juga melahirkan rumusan Kepribadian Muhammadiyah. Kerja digarap oleh suatu tim diketuai oleh KH Faqih Usman. • Diadakan kursus kader pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia untuk menggerakkan kembali gerak perjuangan Muhammadiyah. • Ada perkembangan baru dalam penyebarluasan pengaruh Muhammadiyah. Surat kabar Utusan Melayu mengabarkan bahwa di Kuala Lumpur telah berdiri pusat Pergerakan Muhammadiyah yang berjujukan sebagai pusat penyiaran dan pendidikan Islam seTanah Melayu. Meskipun secara organisatoris eksistensinya berada di luar persyarikatan tetapi anggaran dasarnya hampir sama dengan Anggaran Dasar Muhammadiyah. • Selama masa kepemimpinan Ahmad Badawi di perkenalkan metode KOKAM dalam administrasi. Tercatat jumlah anggota Muhammadiyah sebanyak 185.119, ranting 2.300, cabang 712, sedangkan daerah-daerah mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara tercatat 36 perwakilan daerah. Setelah Irian Barat kembali ke pangkuan RI mulai terlihat pengaruh Muhammadiyah di Fakfak, Kotabaru, Sorong Besar, Sorong Raja Empat, dan Manokwari yang dimotori oleh Ibrahim Bauw Radja Rumbeti serta pejabat daerah dan pegawai negeri yang menjadi anggota Muhammadiyah. • Dikeluarkan dokumen berjudul “Kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962-1965 dan 1965-1968” yang memberikan gambaran tentang interaksi Muhammadiyah di dalam Percaturan Politik nasional dalam periode itu. Kebijakan tersebut lebih merupakan kebijakan politik Muhammadiyah dalam menetapkan kebijakan untuk beradaptasi dan berinteraksi terhadap persoalan-persoalan politik yang timbul.

1963	<ul style="list-style-type: none"> • Nasyiatul 'Aisyiyah diberi status otonom lepas dari 'Aisyiyah. • Ahmad Badawi diangkat menjadi Penasehat Pribadi Presiden di bidang agama.
1964	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai gerakan dan aksi perjuangan yang dilakukan K.H. Fakhruddin adalah dalam rangka memperbaiki nasib dan kondisi umat serta bangsa Indonesia dari lumpur kebodohan, kehinaan dan ketertindasan di tangan penjajahan kolonial Belanda. Berkat jasa-jasanya dalam perjuangan, Pemerintah RI memberinya penghargaan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan keputusan Presiden RI no. 162/1964. • 14 Maret/29 Syawal 1384. Berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)(Fathoni, 101).
1965	<ul style="list-style-type: none"> • Munas I Nasyiatul 'Aisyiyah. Hadir di sana perwakilan dari 33 daerah dan 166 cabang. • Muktamar XXXVI Muhammadiyah di Bandung. • 16 Agustus, Badan Koordinasi Amal; Muslimin terbentuk. Muhammadiyah merupakan nsalah satu organisasi pendukung utama di antara 16 organisasi yang tergabung dalam badan itu.
1966	<ul style="list-style-type: none"> • Sukarno mengatakan dalam biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, "Yang senantiasa menjadi keinginanku ialah agar peti matiku diselubungi dengan panji Islam Muhammadiyah" (hal. 459). • 15 Agustus, Syukuran pembebasan tahanan politik Islam di Mesjid Al Azhar. Acara dipimpin oleh Prof. Dr. Hamka
1968	<ul style="list-style-type: none"> • Muktamar XXXVII Muhammadiyah di Yogyakarta. • Ahmad Badawi diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Munawar Kholil
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 23 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki laki
Nama Ayah : Drs. H. Sukiran
Nama Ibu : Hj. Subiyatun
Asal Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar
Alamat rumah : Ngadiluwih 01/08 Matesih Karanganyar Jawa Tengah, 57781
Alamat di Yogyakarta: Jl. Laksda Adisucipto 112 B Yogyakarta
Status Perkawinan : Belum Menikah
Nomor Telpon : 081804447891
Email : mkholil62@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK ABA Ceporan : Tahun 1989
MI Muhammadiyah Ceporan : Tahun 1995
MTs Negeri Karanganyar : Tahun 1999
MA Negeri Karanganyar : Tahun 2002
UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2009

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Remaja Muhammadiyah Cab. Matesih
2. Organisasi Siswa Intra Sekolah MTsN Kra
3. Tapak Suci Putera Muhammadiyah Daerah Kra
4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cab. Sleman